

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi yang sangat pesat telah mendorong terjadinya digitalisasi di berbagai aspek kehidupan yang mampu membawa perubahan besar dalam aktivitas manusia dan dinamika internasional. Digitalisasi yang semakin berkembang ini juga mempercepat arus informasi, komunikasi, dan meningkatkan efisiensi di berbagai sektor, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya (Cavelty et al., 2024). Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, salah satunya adalah serangan siber (*cyber crime*) yang hal ini mampu menciptakan tantangan serius bagi negara maupun masyarakat internasional. Serangan siber ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok kriminal, tetapi juga oleh negara sebagai bagian dari strategi militer dan diplomasi dalam persaingan geopolitik (Maness & Valeriano, 2016). Dengan begitu negara yang memiliki kemampuan teknologi siber yang mutakhir akan mengandalkan dunia digital untuk mencapai kepentingan nasionalnya, baik dalam aspek ekonomi, politik, maupun militer.

Salah satu negara yang secara aktif memanfaatkan teknologi siber sebagai bagian dari strategi geopolitik adalah Korea Utara. Dalam konteks ancaman siber global yang semakin kompleks, Korea Utara merupakan aktor yang menggunakan serangan siber tidak hanya untuk kepentingan keamanan nasional, tetapi juga sebagai alat untuk mengimbangi keteringgalannya dalam aspek ekonomi dan

diplomasi. Meskipun secara global negara ini sering dipandang sebagai negara yang terisolasi, kondisi perekonomian yang lemah, dan sangat bergantung pada bantuan luar negeri, Korea Utara justru menunjukkan kemampuan adaptifnya melalui strategi non-konvensional. Selain serangan siber, adanya program nuklir yang kontroversial telah menjadikannya sasaran sanksi internasional yang semakin mempersempit ruang geraknya di panggung diplomasi global (Kim, 2022). Namun, di balik keterbatasan tersebut, Korea Utara terus mengembangkan kekuatan sibernya secara signifikan yang hal ini merupakan sebuah aspek yang sering diabaikan oleh komunitas internasional karena anggapan bahwa rezim tertutup minim inovasi dalam bidang teknologi.

Salah satu unit utama dari strategi siber Korea Utara adalah Lazarus Group yang merupakan kelompok peretas yang dikenal luas karena keterlibatannya dalam berbagai serangan siber berskala internasional. Kelompok ini diyakini memiliki afiliasi erat dengan pemerintah Korea Utara dan telah menargetkan sejumlah sektor penting, mulai dari lembaga keuangan hingga sistem infrastruktur kritis. Pada tahun 2022, Lazarus Group melakukan serangan terhadap platform kripto *Axie Infinity* yang mengakibatkan kerugian sekitar 620 juta dolar Amerika Serikat (Schaffer, 2022). Selain itu, pada awal tahun 2025 ini, Lazarus Group juga telah membobol salah satu platform kripto *Bybit* sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat yang menjadikannya salah satu pencurian kripto terbesar sepanjang sejarah (Rajic & Brock, 2025). Peristiwa ini menunjukkan bahwa aktivitas siber tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan keamanan, tetapi juga sebagai sumber pendanaan alternatif dalam menghadapi isolasi ekonomi. Keberhasilan operasi-operasi

Lazarus Group mengindikasikan bahwa di balik keterbatasan konvensional, Korea Utara memiliki kemampuan teknologi yang berkembang secara signifikan dan mampu menimbulkan dampak nyata di ranah global.

Serangan siber yang dilakukan oleh Lazarus Group memicu reaksi keras internasional terhadap Korea Utara dengan mempertegas sanksi yang membuat dinamika Korea Utara dalam ranah internasional menjadi terhambat. Selain itu, PBB dan negara-negara Barat menuduh bahwa tindakan yang dilakukan Korea Utara melalui serangan Lazarus Group ini secara sistematis melanggar hukum internasional dan untuk memenuhi ambisi negaranya, baik itu untuk meningkatkan kekuatan militernya maupun posisinya di panggung internasional. Respon Amerika Serikat dan sekutu ini tentu sangat merugikan Korea Utara karena bisa merusak citra dan setiap tindakan yang akan dilakukan Korea Utara dianggap mengancam stabilitas keamanan internasional sehingga akan menyulitkan Korea Utara untuk terus bertahan di sistem internasional yang anarkis ini. Dengan demikian, cara Korea Utara menghadapi respon tersebut mampu menentukan arah gerak dan keberlangsungan Korea Utara kedepannya, apakah Korea Utara akan menerima secara terbuka sanksi yang dijatuhkan serta label dari aktor internasional mengenai betapa berbahayanya Korea Utara atau Korea Utara sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut dan terus bergerak sesuai kepentingan nasionalnya.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis sampaikan, maka rumusan masalah penelitian yang didapat yaitu:

*Bagaimana respon Korea Utara dalam menghadapi dugaan serangan siber Lazarus Group sebagai alat negara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya?*

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis respon Korea Utara terhadap dugaan kelompok peretas Lazarus Group sebagai instrumen siber negara untuk mendukung kepentingan nasionalnya di tengah tekanan sanksi internasional dan isolasi global.

#### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan khusus penelitian ini untuk:

1. Menganalisis respon Korea Utara terhadap dugaan serangan siber dari kelompok peretas Lazarus Group sebagai bagian dari strategi sibernya dalam rangka memenuhi dan mempertahankan kepentingan nasional.
2. Mengungkap peran strategis Lazarus Group dalam mendukung aspek ekonomi, militer, dan politik Korea Utara di tengah tekanan sanksi internasional dan isolasi global.
3. Menjelaskan bagaimana respon Korea Utara dalam menanggapi dugaan tersebut berdampak pada langkah maupun keputusan yang diambil dengan dasar bahwa aktivitas sibernya menjadi instrumen non konvensional yang efektif dalam mempertahankan eksistensi

dan memperkuat posisi Korea Utara dalam sistem internasional yang anarkis.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional. Dengan mengkaji respon Korea Utara terhadap dugaan Lazarus Group merupakan salah satu instrumen untuk menyerang aktor-aktor internasional untuk mencapai tujuan nasionalnya, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana langkah yang diambil Korea Utara dalam mengatasi label maupun sanksi yang merupakan respon dari aktor internasional, apakah hal ini akan mempengaruhi langkah Korea Utara untuk mencapai kepentingannya atau tidak mengingat label maupun sanksi yang dijatuhkan ini sebagai konsekuensi dari langkah siber yang agresif.

##### **1.4.2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, analis keamanan siber, dan kalangan akademisi dalam memahami ancaman strategis yang ditimbulkan oleh kelompok peretas yang disponsori negara seperti Lazarus Group. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan keamanan siber nasional dan kerja sama internasional yang lebih adaptif terhadap ancaman siber lintas negara. Selain itu, pemahaman yang diperoleh dari studi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran publik dan institusi terhadap pentingnya sistem pertahanan siber yang kuat dan terintegrasi.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Literature Review**

Kajian mengenai serangan siber telah menjadi bagian penting dalam studi hubungan internasional, terutama karena dampaknya yang luas terhadap keamanan global, stabilitas politik, dan tatanan hukum internasional. Sebagian besar penelitian sebelumnya menyoroti bagaimana serangan siber bekerja, dampak dari serangan siber terutama serangan Lazarus Group dari Korea Utara, dan mengenai respon Amerika Serikat dan sekutu terhadap Korea Utara. Namun penelitian ini mengambil sudut pandang yang berbeda, yaitu mengenai respon Korea Utara terhadap tuduhan internasional

Dalam artikel *Kim Jong Un's Populism: The People-First Principle in North Korean Foreign Policy* yang ditulis oleh Suehyun Jung membahas mengenai Kim Jong Un yang menggunakan prinsip *People-First* sebagai basis populisme otoriter yang memengaruhi kebijakan domestik sekaligus kebijakan luar negeri Korea Utara. Dalam artikel ini, kebijakan luar negeri Korea Utara, khususnya kebijakan nuklir bukan hanya sebagai respon terhadap tekanan internasional, melainkan juga untuk menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan strategi yang dirancang untuk memperkuat dukungan domestik serta menjaga stabilitas rezim. Konsep *authoritarian populism* menjelaskan bahwa meskipun berada dalam sistem otoriter, persepsi dan dukungan rakyat tetap dipandang sebagai langkah strategis karena dapat memengaruhi kalkulasi biaya dan manfaat dalam pengambilan keputusan luar negeri. Selain itu, prinsip *People-First* juga mampu menciptakan dinamika dua arah berupa *virtuous circle* ketika keberhasilan

diplomasi meningkatkan legitimasi rezim dan *vicious circle* ketika kegagalan diplomasi seperti KTT Hanoi 2019 justru melemahkan kredibilitas pemerintah dan mendorong Korea Utara kembali mengandalkan kontrol internal yang lebih ketat serta kekuatan nuklir (Jung, 2024).

Dalam artikel jurnal *North Korea Cyber Attack and Policy Responses: An Interdisciplinary Theoretical Framework* yang ditulis oleh Jeeseon Hwang dan Kyung-Shick Choi membahas mengenai serangan siber dilakukan oleh Korea Utara agar bisa bertahan dari tekanan internasional. Korea Utara mengalami kondisi dimana sanksi internasional yang dijatuhkan mengakibatkan Korea Utara kesulitan untuk mencukupi kebutuhan negaranya sehingga Korea Utara mengambil langkah non-konvensional yaitu melalui serangan siber. Dikarenakan adanya sanksi internasional, tujuan serangan siber yang awalnya untuk spionase atau mencuri data-data penting menjadi pencurian finansial yang menasar platform kripto, seperti kasus peretasan *Sony Pictures* dan virus *WannaCry*. Tujuan serangan siber terhadap sektor finansial adalah agar Korea Utara mampu bertahan meskipun terkena sanksi internasional yang menghambat perekonomian dan pembangunan negara. Selain itu, jurnal ini juga menjelaskan bahwa respon Amerika Serikat dan sekutu terhadap serangan siber Korea Utara cenderung lemah dan terfragmentasi dikarenakan adanya ketidakjelasan hukum dalam lingkup siber yang ditandai dengan kesulitan untuk membuktikan siapa pelakunya secara hukum karena tidak menutup kemungkinan pelaku menggunakan identitas palsu dan ketika melakukan serangan berada di luar jangkauan yurisdiksi negara korban (Hwang & Choi, 2021).

Artikel jurnal yang berjudul *Hack, heist, and havoc: The Lazarus Group's triple threat to global cybersecurity* oleh Arif Perdana, Muhammad Erza Aminanto, dan Bayu Anggorojati membahas mengenai kelompok hacker Lazarus Group sebagai salah satu aktor siber yang sangat berbahaya dan memiliki afiliasi dengan Korea Utara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, seperti memperkuat posisi geopolitik dan ekonomi Korea Utara. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai strategi Lazarus Group dalam beraksi, yaitu *hack* yang bertujuan untuk mengincar informasi sensitif dari institusi politik, militer, dan korporasi guna memperkuat posisi geopolitik Korea Utara. *Heist* yang berfokus pada pencurian aset digital, terutama melalui peretasan platform kripto dan bank internasional, sebagai sumber pendanaan rezim. *Havoc* yang merupakan serangan siber dari Lazarus Group untuk menciptakan kekacauan dan kerusakan fatal bagi korban. Selain itu, teknik serangan yang digunakan Lazarus Group dapat dikatakan efektif dan efisien karena mencangkup rekayasa sosial yang mengelabui korban untuk mengunduh malware, adanya pengembangan malware tingkat lanjut, dan teknik penghindaran forensik (Perdana et al., 2024).

Dalam jurnal *North Korea's Cyber Capabilities and Their Implications for International Security* yang ditulis oleh Min-hyung Kim membahas mengenai cara Korea Utara dalam menghadapi permasalahan dalam negaranya. Meskipun Korea Utara negara miskin dan tertinggal teknologi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya, Korea Utara mampu menjadikan kekuatan siber negaranya menjadi kekuatan besar dalam dunia siber global. Dengan menjadikan siber sebagai senjata asimetris, Korea Utara memanfaatkan aktivitas peretasan tidak hanya untuk

menyabotase musuh dan mencuri informasi, tetapi juga untuk mendanai program nuklirnya melalui pencurian aset digital. Selain itu, kekuatan siber ini menjadi ancaman serius terhadap stabilitas kawasan dan keamanan internasional karena sulitnya penelusuran, lemahnya norma hukum internasional, dan besarnya keterlibatan aktor non-negara (Kim, 2022).

Artikel jurnal *North Korea's Pursuit of Coercive Leverage in the Information Age: Expanding Cyber and Counterspace Capabilities* yang ditulis oleh Heylyung Yun membahas bahwa sejak KTT Hanoi 2019, Korea Utara mengalami posisi yang cukup merugikan karena senjata nuklirnya tidak mampu memaksa Amerika Serikat untuk mencabut sanksi ekonomi. Berdasarkan artikel jurnal ini, senjata nuklir tidak selalu mampu membuat Korea Utara di posisi menang karena ketika Korea Utara menggunakan nuklirnya secara agresif pasti akan memicu perang nuklir. Oleh karena itu, Korea Utara mengambil langkah melalui siber agar tetap bisa bertahan sembari melakukan serangan untuk menekan aktor internasional. Melalui Lazarus Group, Korea Utara mampu melakukan pencucian uang setiap melakukan pencurian aset kripto, selain itu, Lazarus Group juga menyerang sistem antariksa musuh dengan melakukan *jamming* sinyal sehingga mengganggu navigasi pesawat sipil dan kapal di Korea Selatan. Dengan begitu melalui serangan siber, Korea Utara mampu menghemat biaya dan terus menyerang karena implementasi hukum internasional dalam lingkup siber masih abu-abu (Yun, 2025).

Meskipun beberapa jurnal diatas telah menjelaskan mengenai cara Korea Utara mempertahankan rezim melalui prinsip *People-First* yang berfokus pada

rakyat, strategi alternatif berupa kekuatan siber, dan ancaman Lazarus Group dalam konteks global, seperti aktivitas spionase, sabotase, penggunaan malware, dan peretasan terhadap sistem keuangan infrastruktur strategis di berbagai negara, masih terdapat celah kajian yang belum banyak diperhatikan. Namun belum membahas bagaimana respon Korea Utara terhadap tekanan internasional yang menghambat berkembangnya Korea Utara. Oleh karena itu, gap penelitian dari beberapa jurnal diatas mengenai respon Korea Utara terhadap tekanan internasional akibat tuduhan serangan Lazarus Group yang merugikan banyak aktor internasional. Selain itu, bagaimana Korea Utara mengelola stigma yang dijatuhkan oleh internasional agar rakyatnya tetap percaya kepada pemerintahan dan menggunakan stigma tersebut untuk melawan ketidakadilan yang dialami. Disisi lain, untuk menunjukkan posisinya, Korea Utara juga memiliki ambisi terhadap panggung internasional yang nantinya mampu membuat aktor internasional mempertimbangkan kembali jika ingin memberikan sanksi kepada Korea Utara.

## **1.5.2 Kerangka Pemikiran**

### *1.5.2.1 Labelling Theory*

*Labelling Theory* atau Teori Labeling berakar dari sosiologi dan kriminologi yang menjelaskan bagaimana tindakan suatu aktor tidak secara otomatis dianggap menyimpang sampai adanya reaksi sosial dari pihak lain. Dalam *Social Pathology* oleh Edwin Lemert (1951) dan *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance* oleh Howard S. Becker (1963) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang lahir melalui proses sosial ketika tindakan diberi label tertentu oleh otoritas maupun masyarakat yang dalam konteks ini penyimpangan bukanlah sifat intrinsik dari tindakan itu

sendiri, melainkan sebuah hasil konstruksi sosial dari pihak yang memiliki kuasa untuk memberi label. Label yang diberikan ini dapat menciptakan stigma dan bahkan mendorong aktor yang dilabeli untuk melakukan tindakan penyimpangan lebih lanjut dan bahkan lebih buruk yang fenomena ini dinamakan *self-fulfilling prophecy* (Becker, 1973). Dengan demikian, teori ini berfokus pada dinamika antara tindakan, pelabelan sosial, dan pembentukan identitas yang terjadi akibat dari proses tersebut.

Dalam hubungan internasional, teori labeling berfungsi untuk memahami bagaimana negara atau aktor non negara dilabeli oleh aktor internasional baik itu melalui diplomasi, media, maupun institusi global. Pelabelan ini membentuk persepsi dan tindakan politik luar negeri, serta dapat memperkuat hierarki kekuasaan internasional. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kyung Hye Kim (2014) dalam artikelnya *Examining US News Media Discourses About North Korea: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis*, pelabelan yang diberikan atas Korea Utara oleh media Amerika Serikat sering kali menggunakan istilah yang menganggap bahwa Korea Utara adalah ancaman, seperti *nuclear menace* atau *cyber aggressor*. Adapun label tersebut berfungsi untuk menumbuhkan stigma terhadap Korea Utara sebagai aktor yang mengancam stabilitas global dan juga untuk membenarkan kebijakan sanksi maupun isolasi (Kim, 2014).

Label yang melekat pada suatu aktor khususnya negara dapat berkembang dari cap moral menjadi alat kontrol politik global. Negara-negara yang mendapatkan label, seperti Iran dan Korea Utara seringkali mengalami pengucilan sistematis dari tatanan internasional. Adapun negara yang mendapat label *state-*

*sponsored activism* ini, seperti Korea Utara digambarkan bahwa negara mendukung aktivitas maupun kelompok tertentu dalam konteks ini siber untuk mencapai tujuan nasionalnya. Dalam kerangka ini, pelabelan berfungsi sebagai instrumen legitimasi bagi kekuatan yang lebih besar untuk mendefinisikan siapa yang dianggap “normal” dan siapa yang dianggap “menyimpang” dari norma internasional (Nissen, 2014). Jadi pelabelan tidak hanya berfungsi untuk menstigmatisasi saja, tetapi juga menciptakan tekanan ekonomi, politik, dan diplomatik terhadap negara yang mendapat label.

Label “*state-sponsored activism*” menjadi salah satu aspek penting dalam konteks keamanan siber global. Dalam artikel *The Impact of State Attribution on Cyber Conflict and International Politics* yang ditulis oleh Lindsay (2015) dalam *International Security* menjelaskan bahwa ketika suatu negara mendapat label *state sponsored activism* terhadap aktor atau kelompok siber non-negara, label tersebut memiliki konsekuensi strategis dan normatif yang menempatkan negara yang mendapat label pada posisi defensif dalam forum internasional, artinya negara harus membuktikan tuntutan bahwa negara tidak salah karena memungkinkan negara akan dijadikan sasaran sanksi internasional yang dapat menghambat atau mempersulit dinamika negara di ranah internasional. Namun dalam beberapa kasus tertentu, negara yang mendapatkan label justru menggunakan label tersebut untuk memperkuat narasi nasionalisme dan legitimasi politik dalam negeri dengan membingkai negaranya sendiri sebagai korban dari bias dan standar ganda Barat (Lindsay, 2015).

Dalam konteks penelitian ini, teori label digunakan untuk memahami bagaimana Korea Utara dilabeli sebagai aktor dari *state sponsored activism* akibat keterkaitannya dengan Lazarus Group yang dituduh melakukan serangan siber terhadap institusi keuangan maupun perusahaan global untuk mencapai kepentingan nasional Korea Utara itu sendiri. Label tersebut bukan hanya sebagai tuduhan teknis semata, tetapi juga membentuk cara pandang internasional terhadap perilaku politik luar negeri Korea Utara. Dengan menerapkan teori label, penelitian ini melihat bahwa cap *state sponsored activism* dapat memperkuat citra Korea Utara sebagai negara yang menyimpang dari norma internasional, tetapi disisi lain juga memperkuat solidaritas domestik dan justifikasi terhadap pertahananannya. Dengan demikian, teori label dapat membantu menjelaskan dimensi sosial dan politis dari cara Korea Utara memaknai, menolak, dan sekaligus memanfaatkan label ini untuk mempertahankan atau mencapai kepentingannya.

#### *1.5.2.2 Gramscian Theory*

*Gramscian Theory* yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan dapat dipertahankan bukan dari paksaan (*coercion*) saja, melainkan kombinasi yang menyangkut paksaan (*coercion*) dan persetujuan (*consent*). Berbeda dari perspektif Marxis tradisional yang dimana kekuasaan dapat dipertahankan dengan dominasi militer dan ekonomi saja, Gramsci menekankan bahwa untuk mencapai hegemoni, rezim atau kelas penguasa sangat bergantung pada kemampuannya untuk menjalankan kepemimpinan secara moral dan intelektual di ruang masyarakat sipil, seperti institusi pendidikan, media, dan budaya (Thomas, 2009). Kemudian, hegemoni dapat dikatakan terwujud yaitu

ketika nilai-nilai, ideologi, dan narasi dari kelompok penguasa diterima secara sukarela oleh masyarakat sipil karena sudah dianggap sebagai sebuah kewajaran atau *common sense* (Patnaik, 1988). Dengan kata lain, hegemoni dibangun dengan pendekatan yang sistematis dan manipulatif untuk menciptakan kontrol ideologi yang dimana pembentukan narasi berperan penting agar masyarakat dapat menerima bahwa itu “wajar”.

Elemen penting dalam teori Gramscian salah satunya yaitu *common sense* atau kewajaran. Menurut Gramsci, *common sense* merupakan kumpulan ideologi dan pemahaman yang tidak terorganisir namun mendarah daging dalam keseharian masyarakat yang ini dapat membuat tatanan sosial tertentu terlihat alami. Penguasa menggunakan institusi seperti media massa, pendidikan, dan narasi negara untuk mengkonstruksi *common sense* (Patnaik, 1988). Melalui mekanisme ini, rakyat tidak merasa sedang dikendalikan, sebaliknya masyarakat merasa bertindak berdasarkan keyakinan sendiri, padahal keyakinan tersebut telah disesuaikan dengan kepentingan stabilitas rezim.

Dalam politik internasional, hegemoni berfungsi sebagai alat dominasi global. Meskipun hegemoni berarti menguasai hampir keseluruhan sistem, tidak menutup kemungkinan bahwa aktor negara dapat melawan hegemoni yang dominan tersebut. Antonio Gramsci mengatakan bahwa hal ini merupakan suatu perwujudan dari *counter hegemony* yang merupakan sebuah upaya untuk melawan hegemoni yang lebih dominan. *Counter hegemony* dapat diwujudkan dengan cara merombak *common sense* yang dominan dan menggantinya dengan narasi alternatif yang lebih progresif atau nasionalistik. Namun, sebelum sebuah negara mampu

memberikan perlawanan yang berarti bagi hegemoni, negara tersebut harus terlebih dahulu mewujudkan hegemoni internal atau domestik yang absolut yang dimana adanya persatuan maupun persamaan perspektif antara masyarakat dengan pemerintah atau penguasa (Im, 1991). Jadi tanpa adanya dukungan masyarakat yang kuat, sebuah negara akan mudah goyah oleh intervensi ideologi dan tekanan politik dari kekuatan hegemonik luar.

Dalam konteks penelitian ini, teori Gramscian digunakan untuk menjelaskan bagaimana Korea Utara merespon tuduhan internasional mengenai penggunaan Lazarus Group sebagai instrumen negara yang merupakan *state sponsored activism* dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Melalui perspektif Gramscian, tuduhan tersebut tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum internasional saja, tetapi sebagai bagian dari dinamika hegemoni global yang dikendalikan oleh kekuatan Barat, khususnya Amerika Serikat. Korea Utara memandang pelabelan dirinya sebagai aktor dari serangan siber sebagai bentuk *hegemonic discourse* yang digunakan untuk mempertahankan dominasi Barat atas sistem keamanan internasional. Dalam situasi ini, aktivitas Lazarus Group justru dapat dilihat sebagai strategi *counter hegemonic* yang berarti upaya Korea Utara untuk melawan keterbatasan ekonomi dan politik akibat sanksi global melalui jalur non-konvensional (Thomas, 2009).

Penggunaan kapasitas siber sebagai instrumen kekuatan adalah upaya Korea Utara untuk menggeser keseimbangan kekuasaan dan menunjukkan bahwa negara kecil mampu menentang tatanan global yang tidak adil karena pada dasarnya tidak ada kekuasaan tertinggi diatas negara dan ini membuktikan kedaulatan Korea Utara.

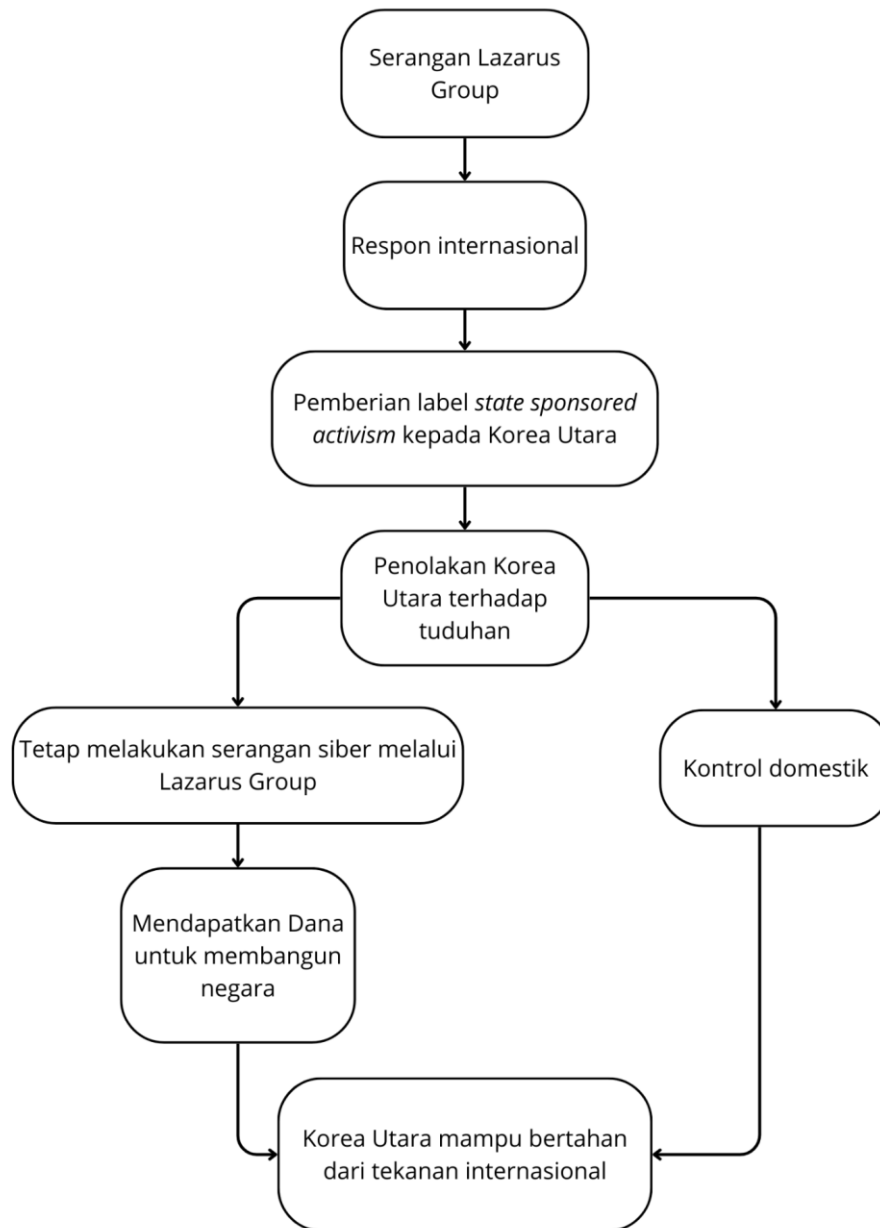
Selain itu, untuk semakin memperkuat hegemoni domestiknya, kontrol masyarakat yang ketat diterapkan untuk menciptakan *common sense* bahwa segala bentuk sanksi internasional adalah penindasan imperialis yang harus dilawan (Patnaik, 1988). Dengan demikian, teori Gramscian dapat membantu menjelaskan bahwa respon Korea Utara bukan hanya bentuk pembelaan diri terhadap tuduhan internasional, tetapi juga manifestasi dari perjuangan ideologis melawan dominasi hegemoni dalam sistem dunia kontemporer.

#### *1.5.2.3 Offensive Realism Theory*

Teori realisme ofensif merupakan pendekatan dalam studi hubungan internasional yang menekankan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara akan memaksimalkan kekuatannya dan berusaha menjadi hegemon. John J. Mearsheimer dalam bukunya *The Tragedy of great Power Politics* menyatakan bahwa negara bukan hanya ingin mempertahankan kekuatannya saja, tetapi juga mencari peluang untuk memperbesar kapabilitas mereka secara ofensif. Hal ini dilakukan karena tidak ada otoritas tertinggi dalam sistem internasional yang dapat menjamin keamanan suatu negara (Mearsheimer, 2003). Maka dari itu, negara akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelangsungan hidupnya, seperti meningkatkan kekuatan militer, ekonomi, dan teknologi secara maksimal. Mearsheimer juga menyatakan bahwa terdapat lima prinsip yang menjadi pondasi teori realisme ofensif: Pertama, sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas di atas negara; Kedua, negara memiliki kekuatan militer yang dapat digunakan untuk mengancam atau menyerang negara lain; Ketiga, negara tidak pernah bisa percaya sepenuhnya terhadap niat negara lain, sehingga negara akan

selalu berasumsi buruk terhadap niat negara lain dan harus mengantisipasi resiko terburuk; Keempat, kelangsungan hidup adalah tujuan utama setiap negara, sehingga semua strategi diarahkan untuk menjaga eksistensinya; Kelima, negara adalah aktor rasional yang dimana negara mampu merancang strategi terbaik berdasarkan kalkulasi kepentingan, meskipun seringkali dalam situasi keterbatasan informasi (Rosyidin, 2022, 39).

Dalam konteks ini, tindakan Korea Utara yang memanfaatkan Lazarus Group sebagai instrumen non-konvensional untuk memperoleh sumber daya ekonomi dan data penting dari negara lain dapat dipahami berdasarkan kelima prinsip realisme ofensif. Contohnya, karena tidak adanya jaminan dari sistem internasional atas kelangsungan rezimnya, Korea Utara menggunakan cara alternatif seperti serangan siber untuk memperoleh keuntungan ekonomi, khususnya dalam menghadapi sanksi internasional. Selain itu, dengan mempertimbangkan bahwa negara lain juga memiliki kekuatan ofensif, maka Korea Utara merancang taktik yang sulit dideteksi atau dibalas secara langsung, seperti lewat dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Utara bertindak secara rasional dan strategis dalam memanfaatkan instrumen non-militer demi mencapai keunggulan relatif terhadap negara lawan. Dengan begitu, dalam perspektif realisme ofensif, strategi siber menjadi instrumen logis dalam persaingan kekuasaan di sistem internasional yang anarkis.



Gambar 1.1. Alur Kerangka Pemikiran Penelitian.

*Sumber: Diolah oleh penulis*

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### *1.6.1 Definisi Konseptual*

#### *1.6.1.1 Stigma*

Tindakan menyimpang yang dilakukan seseorang atau kelompok dapat terjadi karena itu adalah sifat aslinya atau terpengaruh dari label dijatuhkan masyarakat lain. Label negatif yang diberikan masyarakat mampu membentuk atau memperburuk tindakan menyimpang yang telah dilakukan. Dalam perspektif sosiologi, Erving Goffman memandang stigma sebagai mekanisme pembentukan identitas negatif yang melekat pada pelanggar norma sehingga aktor yang melanggar tidak hanya sebagai ancaman maupun sifat buruk saja, melainkan juga mengalami delegitimasi sehingga keberadaannya dipersepsikan sebagai sesuatu yang layak dicurigai, dijatuhkan, bahkan dilawan. Dalam dinamika sosial dan politik, stigma berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mampu membentuk persepsi publik, mengontrol narasi, dan membatasi ruang gerak pihak yang mendapat label negatif. Ketika aktor telah mendapatkan stigma yang buruk, masyarakat internasional cenderung mewaspadaai, bias, atau penuh prasangka meskipun belum ada banyak bukti yang menunjukkan keburukan pihak yang dilabeli. Jadi stigma bukan hanya sekadar label saja, melainkan proses pembentukan realitas sosial yang dapat mempengaruhi identitas, legitimasi, dan posisi suatu pihak dalam panggung global (Goffman, 1986).

#### *1.6.1.2 Counter Hegemony*

Berangkat dari pemikiran Gramsci yang menyadarkan bahwa untuk mencapai hegemoni tidak selalu dibangun dengan cara koersif atau melalui kekuatan

tradisional saja, melainkan menggunakan pendekatan secara sistematis dan ‘manipulatif’ yang dapat diterima oleh masyarakat untuk menciptakan *counter hegemony* yang menentang tatanan hegemonik yang dominan. Individu maupun kelompok melakukan pengontrolan ideologi, pembentukan narasi, bahkan merubah budaya sedemikian rupa yang mampu merubah persepsi masyarakat terhadap tatanan hegemonik yang dominan. Jadi *counter hegemony* bukan hanya sebatas melawan tatanan hegemoni melalui cara-cara tradisional, melainkan melalui persatuan dengan masyarakat dengan pemikiran dan persepsi sama melalui kontrol ideologi ketat yang dilakukan oleh individu maupun kelompok menjadi senjata untuk melawan tatanan hegemonik yang dominan dan mencapai hegemoni yang diinginkan oleh individu maupun kelompok penentang (Im, 1991).

#### 1.6.1.3. *Common Sense*

*Common sense* atau akal sehat kolektif dalam perspektif Gramscian bukanlah kebenaran objektif, melainkan sebuah konstruksi ideologis yang diciptakan oleh kelas penguasa atau negara untuk menjadi cara pandang dunia yang dominan di masyarakat. Konsep ini bekerja dengan cara mengubah kepentingan politik penguasa menjadi sebuah kewajaran yang tidak lagi dipertanyakan oleh warga. Melalui kontrol terhadap institusi sosial dan budaya, negara menanamkan narasi sedemikian rupa sehingga kebijakan atau tindakan pemerintah diterima oleh warga secara sukarela (*consent*) karena dianggap sebagai kebenaran umum yang masuk akal dan alami (Patnaik, 1988).

#### 1.6.1.4. *Kepentingan Nasional*

Kepentingan nasional merujuk pada tujuan utama yang ingin dicapai oleh suatu negara dalam interaksi internasional, baik dalam bentuk perlindungan keamanan, pencapaian kesejahteraan ekonomi, maupun pengaruh politik. Kepentingan nasional memiliki sifat objektif dan tidak berubah yang dimana bertujuan untuk menjaga eksistensi dan meningkatkan kekuasaan negara dalam sistem internasional. Menurut Hans Morgenthau, kepentingan nasional adalah prinsip panduan dalam kebijakan luar negeri yang berbasis pada realitas kekuatan (Rosyidin, 2022).

#### 1.6.1.5. *Self Help*

*Self help* merupakan prinsip fundamental yang menyatakan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas keamanannya sendiri, karena tidak ada otoritas internasional yang mampu menjamin keselamatan negara. Dalam sistem internasional yang anarkis ini, negara tidak dapat sepenuhnya mempercayai niat negara lain, sehingga harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan dan menghindari ancaman yang ada. Konsep ini menekankan bahwa sikap mandiri negara dalam mempertahankan eksistensinya tanpa mengandalkan sistem kolektif seperti aliansi atau organisasi internasional (Dugis, 2016).

### 1.6.2 *Definisi Operasional*

#### 1.6.2.1 *Stigma*

Sifat Korea Utara yang tidak tunduk pada norma maupun sistem internasional yang ada, seperti ancaman nuklir, rudal balistik, dan serangan siber yang dilakukan oleh Lazarus Group mengakibatkan Korea Utara mendapatkan sanksi internasional dan label buruk yang menyempitkan ruang gerak Korea Utara dalam dinamika

internasional. Berawal dari narasi yang dibuat oleh Barat untuk menjatuhkan Korea Utara dari sanksi hingga label buruk, telah berhasil membuat masyarakat internasional memiliki persepsi yang sama sehingga menjadi semakin waspada dan menaruh kecurigaan yang tinggi terhadap setiap tindakan atau keputusan yang dibuat oleh Korea Utara. Persepsi yang sama ini pada akhirnya menciptakan stigma bahwa apapun tindakan atau keputusan yang akan diambil Korea Utara merupakan ancaman terhadap stabilitas internasional meskipun belum tentu tindakan maupun keputusan yang buruk atau mengancam (Goffman, 1986).

#### 1.6.2.2 *Counter Hegemony*

Dalam menghadapi tekanan internasional yang berupa sanksi dan label buruk yang dijatuhkan, Korea Utara berusaha melawan dengan kekuatan tradisional dan modern. Selain menggunakan kekuatan tradisional, seperti kekuatan militer dan kekuatan sibernya, Korea Utara dengan ideologi *juche* berusaha mengontrol warganya agar memiliki persepsi sama, yaitu bahwa aktor internasional yang sebenarnya membenci dan ingin menjatuhkan Korea Utara melalui sanksi internasional dan label yang membentuk stigma buruk bagi Korea Utara yang merupakan *state sponsored activism* dalam konteks serangan siber Lazarus Group yang telah memberikan ancaman bagi banyak pihak. Melalui kontrol ideologi yang ketat dan pembentukan narasi, Korea Utara ingin mewujudkan perlawanan selain dari kekuatan tradisional, yaitu kekuatan persepsi warganya yang mampu menjadi senjata dan kekuatan Korea Utara itu sendiri untuk mewujudkan hegemoni yang melawan hegemoni Barat (Im, 1991).

#### 1.6.2.3 *Common Sense*

Korea Utara berusaha membentuk *common sense* pada rakyatnya melalui kontrol sosial yang ketat dan hegemoni ideologi yang dijalankan oleh rezim Korea Utara untuk menormalisasi narasi negara di domestik. Negara secara sistematis mengonstruksi pandangan dunia rakyatnya melalui propaganda intensif dan narasi sejarah yang menstigmakan Barat sebagai entitas "jahat", salah satunya melalui institusi seperti Memorial Sinchon. Narasi ini menciptakan basis moral bahwa setiap langkah pertahanan yang diambil negara adalah tindakan yang benar. Kepercayaan masyarakat kemudian diperkuat melalui keberhasilan strategi ekonomi non-konvensional, di mana dana yang diperoleh dari aktivitas siber Lazarus Group tidak hanya dialokasikan untuk pengembangan kekuatan militer, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur sipil dan fasilitas sosial (Patnaik, 1988).

#### 1.6.2.4. *Kepentingan Nasional*

Kepentingan nasional merupakan tujuan utama yang ingin dicapai negara dalam hubungan internasional, baik dalam hal keamanan, kelangsungan rezim, maupun pengaruh global. Dalam hal ini, kepentingan nasional Korea Utara dapat dilihat dari upaya negara tersebut untuk membiayai kelangsungan pemerintahannya, memperkuat program militer seperti nuklir, dan mempertahankan kekuasaan Kim Jong Un. Hal ini dibuktikan dengan operasi Lazarus Group yang menghasilkan miliaran dolar melalui peretasan yang mendukung pencapaian kepentingan nasional secara langsung, baik untuk penguatan ekonomi maupun sebagai alat tekanan terhadap negara lawan (Rosyidin, 2022).

#### 1.6.2.5. *Self Help*

*Self help* merupakan prinsip dasar dalam teori realisme yang menyatakan bahwa negara tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pihak lain dalam menjamin keamanannya. Konsep ini diwujudkan melalui tindakan Korea Utara dalam membangun dan menjalankan unit siber secara independen sebagai alat pertahanan sekaligus sumber ekonomi. Korea Utara mengandalkan kekuatan internal seperti Lazarus Group untuk menghindari isolasi ekonomi dan sanksi internasional yang dimana membuat strategi *self help* menjadi nyata. Adapun operasi siber ini digunakan secara sepihak tanpa kolaborasi dengan kekuatan eksternal yang menunjukkan adanya ketergantungan penuh pada kemampuan sendiri. Selain itu, narasi mengenai siber ini bisa menjadi kekuatan untuk meyakinkan warganya dalam menghadapi hegemoni Barat. Dengan begitu, Lazarus Group mencerminkan implementasi nyata dari prinsip *self help* negara yang hidup di bawah tekanan sistem internasional yang penuh tantangan (Dugis, 2016).

### **1.7. Argumen Penelitian**

Meskipun berada dalam kondisi terisolasi secara ekonomi dan diplomatik akibat sanksi internasional, Korea Utara justru menunjukkan kemampuan adaptif yang luar biasa dalam mempertahankan eksistensinya di tengah dinamika politik global. Di tengah keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kerja sama internasional, negara ini berhasil mengembangkan kekuatan militer dan teknologi siber yang cukup maju sehingga menimbulkan ancaman nyata bagi keamanan internasional. Berdasarkan serangan destruktif dari kelompok hacker Lazarus Group, respons internasional terhadap Korea Utara sangat beragam bahkan menganggap bahwa

serangan Lazarus Group ini telah diatur sebagaimana mestinya oleh Korea Utara untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam hal kekuatan militer, peningkatan ekonomi, dan menguatkan posisinya di ranah global. Terlebih Korea Utara mendapatkan label bahwa Lazarus Group merupakan *state sponsored activism* yang mampu membuat stigma masyarakat internasional mengenai Korea Utara semakin memburuk, setelah adanya permasalahan mengenai kekuatannya yang mengancam stabilitas regional. Maka dari itu, penelitian ini berargumen bahwa dalam menanggapi respons dan stigma internasional, Korea Utara mampu mengelola stigma tersebut dan bahkan memanfaatkannya untuk semakin menguatkan posisi Korea Utara di ranah global. Hal ini juga didasari bahwa Korea Utara meresponnya dengan menganggap bahwa stigma dan sanksi internasional yang dijatuhkan merupakan sebuah cara negara Barat untuk menekan Korea Utara mengingat banyak dari tindakan maupun keputusannya dianggap negara Barat kontroversial dan dapat merugikan kepentingan negara Barat. Terlebih kondisi isolasi yang dialaminya membuat Korea Utara lebih mudah untuk tetap mengontrol masyarakat dan dinamika lokalnya, sehingga masyarakat Korea Utara sendiri pada akhirnya akan mendukung pemerintahnya. Seperti yang dijelaskan dalam *Gramscian Theory* bahwa hegemoni bukan hanya mengenai dominasi negara terhadap negara lain, melainkan hegemoni juga berarti bagaimana negara tetap mengontrol rakyatnya untuk tetap percaya kepada pemerintah ditengah stigma maupun informasi dari pihak lain yang merugikan negara itu sendiri.

## **1.8. Metode Penelitian**

### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian mengenai *Respon Korea Utara Berkaitan dengan Tuduhan Serangan Siber oleh Kelompok Peretas Lazarus Group dalam Mempertahankan Kepentingan Nasional* ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memaparkan bagaimana Korea Utara merespon tuduhan internasional terhadap Lazarus Group yang diduga disponsori oleh Korea Utara. Selain itu, juga untuk menganalisis alasan strategis di balik respon tersebut, dengan mengaitkannya pada upaya mempertahankan legitimasi rezim melalui perspektif teori *Labelling*, *Gramscian*, dan *Offensive Realism*.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Situs penelitian dalam studi ini bersifat non-fisik karena penelitian dilakukan melalui pendekatan studi pustaka (*library research*), sehingga tidak mengacu pada lokasi geografis tertentu. Fokus utama penelitian ini adalah respon Korea Utara terhadap tuduhan yang dijatuhkan Barat dan cara Korea Utara mempertahankan legitimasinya. Oleh karena itu, situs penelitian mencakup ruang digital dan sumber literatur akademik yang tersedia baik secara daring maupun cetak, meliputi jurnal internasional, laporan dari organisasi internasional, artikel media kredibel, serta situs resmi milik pemerintah dan lembaga keamanan siber yang relevan dengan topik penelitian.

### **1.8.3. Subjek Data**

Subjek dalam penelitian ini adalah negara Korea Utara sebagai pembuat kebijakan dan penyedia narasi pertahanan terhadap tuduhan siber. Selain itu, Lazarus Group diposisikan sebagai subjek yang menjadi objek pelabelan, sementara Amerika Serikat beserta sekutunya menjadi subjek pembanding yang memberikan label state-sponsored cyber warfare terhadap aktivitas tersebut.

### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif sekunder. Data tersebut mencakup teks pernyataan resmi, transkrip pidato diplomasi Korea Utara, serta dokumen laporan teknis mengenai insiden siber. Data kualitatif ini dipilih karena mampu memberikan kedalaman interpretasi terhadap motif politik dan strategi komunikasi Korea Utara dalam menepis stigma internasional sebagai negara pendukung kejahatan siber.

### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini berasal dari sumber sekunder yang memiliki kredibilitas tinggi. Data diperoleh melalui laporan resmi Dewan Keamanan PBB, dokumen dakwaan hukum (*criminal indictment*) dari Departemen Kehakiman AS, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas politik luar negeri Korea Utara. Selain itu, berita dari media pemerintah Korea Utara (KCNA) digunakan sebagai data pembanding untuk melihat bagaimana narasi dikonstruksi secara resmi.

### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan yang intensif. Penulis mengumpulkan dokumen-dokumen kunci terkait kasus besar

seperti peretasan Sony Pictures, WannaCry, dan peretasan *cryptocurrency*, kemudian melakukan kategorisasi terhadap respon-respon yang diberikan oleh Korea Utara. Melalui teknik ini, data diolah dengan cara mereduksi informasi yang tidak relevan dan memfokuskan pada pola-pola respon yang konsisten.

#### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang mengadopsi teknik analisis dari *grounded theory*, yaitu melalui tiga tahap utama: *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* (Noble & Mitchell, 2016). Pada tahap *open coding*, penulis akan melakukan identifikasi dan klasifikasi informasi penting dari berbagai data sekunder, seperti pernyataan resmi pemerintah Korea Utara dan laporan internasional untuk menemukan konsep-konsep awal mengenai pola respons Korea Utara. Selanjutnya, pada tahap *axial coding*, kategori-kategori tersebut dihubungkan satu sama lain untuk melihat keterkaitan antara aktivitas Lazarus Group, strategi kontra-narasi Korea Utara, dan upaya mempertahankan legitimasi negara. Terakhir, melalui *selective coding*, peneliti merumuskan tema utama yang mengintegrasikan seluruh temuan untuk menjelaskan bagaimana Korea Utara secara strategis mengelola stigma internasional dan memanfaatkan posisi "penyimpang" dalam sistem anarkis untuk memperkuat posisi tawarnya di panggung global. Keseluruhan proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan interpretasi data mampu menjawab rumusan masalah mengenai strategi Korea Utara dalam menghadapi tuduhan serangan siber secara mendalam dan teoritis.

### **1.8.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)**

Untuk menjamin kualitas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan empat kriteria, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. *Credibility* diupayakan melalui teknik triangulasi sumber, yakni dengan melakukan pengecekan silang antara pernyataan resmi pemerintah Korea Utara dengan laporan investigasi dari lembaga internasional (seperti PBB dan Departemen Kehakiman AS) serta literatur akademik yang relevan. *Transferability* dipenuhi dengan menyajikan deskripsi mendalam mengenai konteks strategi siber Korea Utara, sehingga temuan dalam penelitian ini dapat dipahami dan kemungkinan diterapkan pada kasus-kasus ancaman siber oleh aktor negara lain dalam studi hubungan internasional. *Dependability* dijaga dengan mendokumentasikan setiap tahapan penelitian dan proses analisis data secara sistematis, mulai dari pengumpulan dokumen hingga tahap *coding* berdasarkan teori yang digunakan. Sedangkan *confirmability* dilakukan untuk menjaga objektivitas hasil penelitian agar tetap berbasis pada data yang ditemukan tanpa dipengaruhi oleh bias personal peneliti. Peneliti menyertakan referensi yang akurat dan kutipan langsung dari dokumen-dokumen resmi sebagai bukti transparansi dalam interpretasi data. Penerapan keempat prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil analisis mengenai respon Korea Utara terhadap tuduhan Lazarus Group bersifat valid, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki integritas akademik yang kuat (Yadav, 2021).